

# Jurnal **MANAJEMEN** **USAHAWAN INDONESIA**

Vol. 42 No. 1 | Januari - Maret 2013 | Harga Rp. 20.000,- | ISSN: 0302-9859



- ☑ **Peran Financing Mix sebagai Mediasi Pengaruh Diversifikasi Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Secondary Sectors di Bursa Efek Indonesia)**  
H.M.A. Rasyid Hs. Umrie & Yuliani
- ☑ **Aplikasi Penilaian Kinerja Reksa Dana Saham Indonesia dengan Metode Jensen Alpha Berbasis CAPM 4 Faktor**  
Maududi & R. Nugroho Purwantoro
- ☑ **Pengaruh Kepuasan, Kepercayaan dan Komitmen Terhadap Loyalitas Pelanggan Ponsel Blackberry (Studi Pada Semarang Cellular Trade Center (SCTC) Matahari Plaza Simpang Lima Semarang)**  
Gregorius N. Masdjojo & Muammar Fahmi
- ☑ **Analisis Pengaruh Leverage Terhadap Profitabilitas Perusahaan Industri Makanan Yang Terdaftar Dalam Bursa Efek Indonesia**  
Yuvita Puspitasari & Lisa Fitriyanti Akbar
- ☑ **Menakar Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Indonesia**  
Agus Prianto
- ☑ **MAKING DECISIONS: \*Involve Your Team \*Evaluate Risks \*Assess Alternatives \*Take Action**  
Niken Ardiyanti

# **Jurnal** **MANAJEMEN** **USAHAWAN INDONESIA**

Adalah media triwulanan yang bertujuan memajukan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan keterampilan manajemen, guna meningkatkan daya dan hasil perusahaan/organisasi di Indonesia. Artikel yang dimuat mengutamakan penerapan dan

adaptasi ilmu manajemen dalam masyarakat. Media ini ditujukan kepada para usahawan swasta maupun pemerintah, manajer, mahasiswa dan pihak-pihak lain yang menaruh minat atas pengetahuan manajemen. Artikel yang dimuat tidak selalu mencerminkan pandangan redaksi. Setiap tulisan yang dimuat menjadi hak media ini dan setiap tulisan yang tidak dimuat akan dikembalikan jika disertai perangko secukupnya. Sertakan alamat lengkap; email, no. telpon, no. Rekening Bank pada tulisan yang dikirimkan ke Usahawan

Pelindung: Prof. Firmanzah, PhD (Dekan FEUI)

Pemimpin Umum: Dr. Toto Pranoto, SE, MM

Ketua Dewan Editor: Prof. Dr. Sofjan Assauri

Anggota Dewan Editor:

- Albert Widjaja, PhD (Universitas Indonesia)
- Dr. Buddi Wibowo (Universitas Indonesia)
- Dr. Ir. Dermawan Wibisono, M.Eng (Institut Teknologi Bandung)
- Dr. Dwi Martani (Universitas Indonesia)
- Prof. Dr. FX Sugiyanto (Universitas Diponegoro)
- Prof. Dr. Ir Hariadi Kartodihardjo, MS (Institut Pertanian Bogor)
- Dr. Ir. Ign. Heruwasto (Universitas Indonesia)
- R. Derina, PhD (University of Adelaide, Australia)
- Dr. Ir. Ruslan Prijadi (Universitas Indonesia)
- Dr. Willem Makaliwe (Universitas Indonesia)

Executive Editor: Ferdy S. Nggao, Msi

Pemimpin Usaha : Beniko Kusumagiri

Marketing & Distribution: Jaka Sanwani

Operation : Joko P

ALAMAT REDAKSI: Lembaga Management FEUI, Jl. Salempa Raya No. 4, Jakarta, Telepon: (062)(21) 31934142, 3907410, Faksimil: (062)(21) 31931610, E mail: usahawan\_lmfeui@yahoo.com, Website: www.lmfeui.com, Bank BNI Cab. Kramat, No. Rek.0010539802 a.n Lembaga Management FEUI, No. 01604/SK/DTJEN, PPG/STT/1990, SIC: Kep. 096/p.c/1971, ISSN: 0302-9859

## DAFTAR ISI

- Peran Financing Mix sebagai Mediasi Pengaruh Diversifikasi Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Secondary Sectors di Bursa Efek Indonesia)  
H.M.A. Rasyid Hs. Umrie & Yuliani ..... 1
- Aplikasi Penilaian Kinerja Reksa Dana Saham Indonesia dengan Metode Jensen Alpha Berbasis CAPM 4 Faktor  
Maududi & R. Nugroho Purwantoro ..... 25
- Pengaruh Kepuasan, Kepercayaan dan Komitmen Terhadap Loyalitas Pelanggan Ponsel Blackberry (Studi Pada Semarang Cellular Trade Center (SCTC) Matahari Plaza Simpang Lima Semarang)  
Gregorius N. Masdjojo & Muammar Fahmi ..... 41
- Analisis Pengaruh Leverage Terhadap Profitabilitas Perusahaan Industri Makanan Yang Terdaftar Dalam Bursa Efek Indonesia  
Yuvita Puspitasari & Lisa Fitriyanti Akbar ..... 61
- Menakar Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Indonesia  
Agus Prianto ..... 74
- MAKING DECISIONS: \*Involve Your Team \* Evaluate Risks \* Assess Alternatives \* Take Action  
Niken Ardiyanti ..... 98

## Menakar Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Agus Prianto

### ABSTRACT

Indonesia has a high potential economy to become a world economic power. At least, it can be identified from the stability of economic growth, rising GDP, increasing income per capita, and supported by so much economic size, market share, a large number of people in the golden age, and abundant natural resources. Based on the existing of the economic potential, it is no reason to doubt the ability of the Indonesian economy to be a leader in the global economic. Economic performance of a country can not be separated by a variety of factors beyond economic variables. The quality of economic growth is strongly influenced by the quality of the nation's competitiveness. Growing economy requires a strongly, effectiveness, and stability of the governance, the availability of adequate infrastructure, rule of law, the availability and reliability of financial institutions, the availability of educated and competent human resources, adequate and quality of education institutions, a strong entrepreneurial culture, as well as a variety of social capital in society. The Indonesian's economic growth will be more qualified if supported by a high competitiveness.

**KEY WORDS :** The quality of economic growth, competitiveness, entrepreneurship culture, productivity

### ABSTRAK

Potensi Indonesia untuk menjelma menjadi kekuatan ekonomi dunia memang sangat besar. Setidaknya, hal itu dilihat dari stabilitas pertumbuhan ekonomi, meningkatnya PDB, meningkatnya pendapatan per kapita; dan didukung dengan begitu besarnya ukuran ekonomi, pangsa pasar, jumlah penduduk besar dan masuk dalam usia produktif, serta kekayaan alam yang sangat melimpah. Memperhatikan begitu besarnya potensi ekonomi yang ada, rasanya tidak ada alasan untuk meragukan kemampuan perekonomian Indonesia untuk masuk dalam barisan depan kekuatan ekonomi dunia. Kinerja perekonomian suatu negara tentu tidak dapat dipisahkan dengan berbagai faktor di luar variabel ekonomi. Kualitas pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh kualitas daya saing bangsa. Perekonomian yang tumbuh dan kuat mensyaratkan adanya pemerintahan yang efektif dan stabil, tersedianya infrastruktur yang memadai, hukum yang tegak berdiri, tersedianya lembaga keuangan yang dapat diandalkan, tersedianya sumber daya manusia yang terdidik dan cakap, institusi pendidikan yang memadai dan berkualitas, budaya wirausaha yang kuat, serta berbagai modal sosial yang berkembang di masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia akan semakin berkualitas bila didukung oleh daya saing yang tinggi.

**KATA KUNCI :** kualitas pertumbuhan ekonomi, daya saing, budaya wirausaha, produktifitas

Dr. Agus Prianto, M.Pd  
adalah dosen Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI Jombang, dapat dihubungi di: pimpinan1@yahoo.co.id

## I. PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, perekonomian Indonesia mampu mencatat pertumbuhan ekonomi pada level yang cukup tinggi dan stabil. Bahkan ketika krisis global melanda berbagai negara di dunia, termasuk negara-negara yang menjadi pasar utama produk ekspor, perekonomian Indonesia tetap mencatat pertumbuhan ekonomi positif. Trend pertumbuhan ekonomi ini diprediksi akan terus berlanjut dalam beberapa tahun kedepan, sehingga beberapa lembaga internasional menempatkan Indonesia sebagai kekuatan baru dalam perekonomian dunia. Momentum pertumbuhan ekonomi yang dalam beberapa tahun belakangan selalu mencatat angka positif ini perlu untuk dirawat dan dikembangkan, sehingga potensi Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi dalam beberapa tahun kedepan benar-benar menjadi kenyataan; bukan sekedar impian belaka.

Mengacu pada data-data yang dikeluarkan oleh lembaga resmi pemerintah dan berbagai lembaga internasional, potensi Indonesia untuk menjilma menjadi kekuatan ekonomi dunia memang sangat besar. Setidaknya, hal itu dilihat dari terus meningkatnya besaran PDB dan rata-rata pendapatan per kapita yang didukung dengan begitu besarnya ukuran ekonomi, pangsa pasar, jumlah penduduk besar dan masuk dalam usia produktif; serta kekayaan alam yang sangat melimpah. Memperhatikan begitu besarnya potensi ekonomi yang ada, rasanya tidak ada alasan untuk meragukan kemampuan perekonomian Indonesia untuk masuk dalam barisan depan kekuatan ekonomi dunia. Tetapi potensi yang besar itu bisa saja akan lenyap apabila seluruh komponen bangsa tidak pandai untuk merawat,

mengembangkan, dan menjaga momentum.

Kinerja perekonomian suatu negara tentu tidak dapat dipisahkan dengan berbagai faktor di luar variabel ekonomi. Perekonomian yang tumbuh dan kuat mensyaratkan adanya pemerintahan yang efektif dan stabil, tersedianya infrastruktur yang memadai, hukum yang tegak berdiri, tersedianya lembaga keuangan yang dapat diandalkan, tersedianya sumber daya manusia yang terdidik dan cakap, institusi pendidikan yang memadai dan berkualitas, budaya wirausaha yang kuat, serta berbagai modal sosial lain yang ada dan berkembang di masyarakat. Pemerintah harus benar-benar mampu menjadi pemimpin dan "dirigen" yang memungkinkan berbagai variabel non ekonomi ini benar-benar terawat, tumbuh, dan berkembang dengan baik; seiring dengan berkembangnya kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, penilaian tentang kinerja dan kualitas perekonomian suatu negara harus diikuti dengan penilaian tentang berbagai variabel di luar ekonomi tersebut.

Pengalaman dari negara-negara maju membuktikan bahwa kinerja ekonomi selalu berjalan beriringan dan berkaitan erat dengan kinerja berbagai variabel non ekonomi. Dalam konteks perekonomian Indonesia, kita menyaksikan munculnya fenomena paradoks. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil, PDB yang sudah masuk 20 besar dunia, dan meningkatnya rata-rata pendapatan per kapita ternyata tidak secara otomatis mampu menekan tingkat pengangguran dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. PDB yang tinggi tetapi diikuti dengan pengangguran dan kesenjangan sosial ekonomi yang tinggi menandakan rendahnya kualitas pertumbuhan ekonomi. Lalu, apa yang harus dilakukan

pemerintah dan segenap komponen masyarakat untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi? Persoalan inilah yang akan dibahas dalam tulisan ini.

## II. KINERJA PEREKONOMIAN INDONESIA

Sampai dengan akhir tahun 2012, Indonesia merupakan salah satu negara yang mampu menciptakan angka pertumbuhan ekonomi di kisaran angka 6%. Capaian ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu di antara tiga negara di dunia (bersama-sama dengan India dan China) yang dianggap mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi pada level tinggi di tengah-tengah adanya ancaman krisis ekonomi global. Capaian kinerja perekonomian Indonesia mampu mengungguli negara-negara yang lebih maju. Di kawasan Asia Tenggara pun pertumbuhan perekonomian Indonesia tetap berada pada level tertinggi.

Berdasarkan data dari International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, October 2012; dalam kurun waktu 2010

sampai dengan 2012, Indonesia merupakan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang mampu mencatat pertumbuhan ekonomi stabil di kisaran 6%. Tabel 1 berikut ini menjelaskan kecenderungan tersebut:

Pada Tabel 1, menunjukkan ketika pertumbuhan ekonomi di negara-negara tetangga berfluktuasi sangat tajam dan cenderung terus menurun, pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung tetap stabil di level tinggi. Stabilitas pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak terlepas dari karakteristik ekonomi nasional yang ditopang oleh besarnya jumlah penduduk yang berarti juga berdampak pada besarnya tingkat konsumsi nasional, besarnya potensi sumber daya alam; dan pembentukan modal sebagai dampak dari meningkatnya angka investasi. Sebagai gambaran, hingga triwulan III tahun 2012, besarnya peran pengeluaran konsumsi masyarakat terhadap pembentukan PDB Indonesia mencapai 54,79%, menyusul kegiatan investasi sebesar 37,58%, dan pengeluaran pemerintah sebesar 8,24% (BPS, triwulan III

**Tabel 1**  
**Angka Pertumbuhan Ekonomi Negara Asean 2010-2012**

No	Negara	Tahun (dalam prosentase)			Rerata
		2010	2011	2012	
1	Indonesia	6,1	6,5	6,1	6,23
2	Singapura	14,7	4,9	2,1	5,93
3	Thailand	7,7	0,1	5,6	4,47
4	Phillipina	7,6	4,0	4,9	5,50
5	Malaysia	7,2	5,1	4,4	5,57
6	Myanmar	5,4	5,5	6,2	5,70
7	Vietnam	6,8	5,9	5,1	5,93
8	Brunei Darussalam	2,6	2,2	2,7	2,50

Sumber: <http://imf.org>, diakses 2 November 2012

2012). Potensi perkembangan ekonomi Indonesia semakin menjanjikan seiring dengan meningkatnya pendapatan perkapita. Dalam kurun waktu yang sama, rata-rata pendapatan per kapita penduduk meningkat 57,15%; dari US\$2.329 pada tahun 2009 menjadi US\$3.660 pada tahun 2012 (<http://imf.org>, diakses 22 Nopember 2012).

Mengutip situs Infobanknews.com, Mike Smith, sang CEO ANZ Group, menyatakan bahwa Indonesia adalah merupakan salah satu dari sangat sedikit negara di dunia yang dianggap memiliki kesiapan tinggi dan memiliki perangkat yang cukup untuk menhadapi dampak krisis global (Infobanknews.com, diakses 5 Maret 2013). Dengan didukung oleh wilayah yang luas, sumber daya alam yang melimpah, dan jumlah penduduk yang besar, potensi Indonesia untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia memang sangat terbuka lebar. Banyak kalangan bahkan menilai bahwa Indonesia sebagaimana layaknya negara autopilot, yakni negara yang perekonomiannya akan tetap berjalan meskipun tanpa adanya peran dan tugas dari pemerintah (<http://ekonomi.kompasiana.com/wirausaha>, diakses 6 Maret 2013). Asumsi ini seolah hendak menguatkan pendapat yang menyatakan betapa aktifitas ekonomi yang dilakukan warga masyarakat memegang peran vital dalam kegiatan ekonomi nasional.

Secara absolut, meningkatnya pendapatan per kapita dalam 3 tahun terakhir sebesar 57,15% dipastikan akan berdampak langsung pada meningkatnya pengeluaran konsumsi masyarakat. Kuatnya pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh besarnya pengeluaran konsumsi masyarakat secara nyata membawa dampak positif pada besaran PDB. Sebagai

gambaran, menurut data Bank Dunia, besaran PDB Indonesia tahun 1990-2010 sebesar 706,558 miliar USD, dan menempatkan Indonesia pada urutan 18 besar ("GDP (current US\$) Data in 2010". [worldbank.org](http://worldbank.org), diakses 15 Juli 2012). Besaran PDB Indonesia menurut CIA World Factbook (2000-2011) sebesar 834,300 miliar USD, dan menempatkan Indonesia pada urutan 17 besar (GDP (Official Exchange Rate. CIA World Factbook. Diakses pada 15 Juli 2012). Selanjutnya besaran PDB Indonesia tahun 2011 naik menjadi 845,680 miliar USD, dan menempatkan Indonesia pada urutan 16 besar di dunia. IMF bahkan memprediksi pada tahun 2015 PDB Indonesia akan mampu menembus angka 1.172,10 miliar USD; dan bila dihitung dari posisi sekarang akan masuk pada urutan 10 besar dunia (<http://imf.org>, diakses 16 Juli 2012).

Peningkatan secara simultan pendapatan per kapita, konsumsi masyarakat, dan PDB seharusnya mampu membuka peluang usaha, dan hal ini tentu akan menjadi kabar baik bagi aktifitas usaha/bisnis yang dilakukan oleh warga masyarakat. Sejauh ini, besarnya potensi ekonomi nasional memang telah mampu menarik pebisnis global untuk masuk ke pasar Indonesia. Mereka inilah yang akhirnya mendapatkan keuntungan terbesar dari berkembangnya perekonomian nasional. Sementara bagi masyarakat lokal, besarnya potensi ekonomi nasional tidak secara langsung mampu meningkatkan aktifitas bisnis mereka. Bahkan kegiatan usaha di level mikro banyak yang kalah bersaing dan terpinggirkan dengan kehadiran pelaku usaha besar, baik dari dalam maupun luar negeri.

Data BPS sebagaimana dipublikasikan melalui Berita Resmi Statistik tahun 2013

memaparkan koefisien Indeks Tendensi Bisnis (ITB) yang masih fluktuatif. Tabel 2 berikut ini menjelaskan kecenderungan tersebut.

Fluktuasi angka koefisien ITB menggambarkan bahwa besarnya potensi ekonomi di dalam negeri tidak serta merta diikuti dengan meningkatnya kegiatan usaha yang ada di masyarakat secara keseluruhan. Tampaknya ada hambatan-hambatan serius yang perlu untuk diurai, sehingga besarnya potensi ekonomi benar-benar mampu menggairahkan aktifitas usaha di masyarakat. Salah satu hambatan serius yang perlu mendapatkan penanganan segera dari pemerintah adalah berkaitan dengan belum memadainya ketersediaan tenaga kerja terdidik dan terampil yang bisa disediakan oleh pemerintah dan masyarakat. Sebagai gambaran, pada awal Maret 2012 permintaan pasar tenaga kerja tercatat 113 juta orang, sedangkan jumlah tenaga terdidik dan terampil tercatat 104 juta orang (<http://merdeka.com>, diakses 5 Maret 2012). Dengan demikian ada permintaan tenaga kerja terdidik dan terampil

sebanyak 9 juta orang yang tidak bisa segera langsung disediakan oleh masyarakat dan pemerintah. Bukan rahasia lagi, kurangnya tenaga terdidik dan terampil merupakan salah satu faktor penghambat kegiatan usaha bisnis di dalam negeri. Kelak, potensi kesempatan kerja yang besar ini hampir pasti akan diisi oleh tenaga kerja dari luar. Kemungkinan ini sangat besar seiring dengan kian terbukanya pasar tenaga kerja di berbagai negara kawasan Asean. Singkatnya, besarnya potensi ekonomi Indonesia ternyata tidak sepenuhnya bisa dinikmati oleh warga masyarakat dalam negeri; tetapi sebagian besar juga dinikmati warga negara asing.

Meskipun ada kekurangan tenaga terdidik dan terlatih dalam jumlah yang sangat besar, hal ini tampaknya tidak mengurangi minat para penanam modal untuk membuka kegiatan usaha dan bisnisnya di Indonesia. Kekurangan tenaga terdidik dan terampil yang ada di dalam negeri akan bisa diisi oleh tenaga kerja asing yang masuk ke dalam negeri, seiring dengan diterapkannya kebijakan pasar terbuka oleh

**Tabel 2**  
Indeks Tendensi Bisnis 2011-2012

No	Periode Pengukuran	Koefisien ITB	Rata-Rata Per Periode Tahun	Asumsi Kondisi Bisnis Dibanding Periode Sebelumnya
1.	I-2011	102,16	-	-
2.	II-2011	105,75	-	Meningkat
3.	III-2011	107,86	-	Meningkat
4.	IV-2011	106,92	105,67	Menurun
5.	I-2012	103,89	-	Menurun (meningkat)*
6.	II-2012	104,22	-	Meningkat (menurun)*
7.	III-2012	107,43	-	Meningkat (menurun)*
8.	IV-2012	105,29	105,20	Menurun (meningkat)*

\*) yang di dalam kurung dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2011  
Sumber: Berita Resmi Statistik No. 15/02/Th.XVI, 5 Februari 2013

berbagai negara di kawasan Asean. Selain itu, dengan memperhatikan proyeksi besaran PDB Indonesia yang dilakukan oleh lembaga moneter internasional dan diperkirakan dalam beberapa tahun ke depan akan menembus angka 1000 miliar USD, maka hal itu memberikan indikasi yang sangat kuat bahwa para penanam modal akan semakin banyak masuk ke Indonesia. Para penanam modal pasti sangat paham bahwa besarnya PDB yang diikuti dengan meningkatnya pendapatan per kapita dari 2.329 USD pada tahun 2009 menjadi 3.660 USD pada tahun 2012 (meningkat 57,15% atau rata-rata per tahun 19,05%) sebagaimana dipublikasikan oleh IMF memberikan sinyal yang sangat kuat bahwa pangsa pasar di Indonesia pada beberapa tahun ke depan akan sangat cerah.

### III. OPTIMALISASI POTENSI EKONOMI

Seiring dengan membesarnya potensi ekonomi Indonesia, ada beberapa permasalahan non ekonomi yang berpotensi menghambat laju pertumbuhan dalam jangka panjang. Hingga saat ini, tampaknya kita kurang sigap menangkap peluang super jumbo yang ada di depan pelupuk mata. Peluang yang dimaksud tidak lain adalah berkaitan dengan kian menggelembungnya besaran PDB, kian derasnya investasi yang hendak ditanam di dalam negeri; dan kian membesarnya rata-rata pendapatan per kapita masyarakat. Berbagai indikator ekonomi ini secara langsung pasti akan membuka peluang usaha dan peluang kerja selebar-lebarnya. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah sampai dimana kesiapan warga masyarakat untuk menangkap berbagai peluang usaha dan peluang kerja kelas super jumbo tersebut? Kesiapan warga

masyarakat itu tidak lain adalah berkaitan dengan kesiapan untuk beraktivitas usaha dan kesiapan untuk memasuki lapangan kerja.

Kesiapan warga masyarakat untuk beraktivitas usaha berkaitan dengan spirit entrepreneurship yang harus menjadi budaya baru di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Meskipun saat ini belum menjadi budaya yang mengakar kuat dalam kehidupan bermasyarakat, munculnya kelompok-kelompok *Pewirausaha Muda Indonesia* (*Indonesia Young Entrepreneurs, IYE; Young Generation*, dan sejenisnya) memberikan secerah harapan bahwa menggelembungnya potensi ekonomi Indonesia kelak akan mampu diikuti tampilnya *pewirausaha* yang tangguh dari anak bangsa sendiri. Pemerintah diharapkan memiliki kebijakan yang mendukung tumbuh suburnya spirit kewirausahaan, karena sampai saat ini jumlah *pewirausaha* di Indonesia masih tertinggal jauh bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga.

Kesiapan untuk memasuki lapangan kerja berkaitan dengan bekal pendidikan yang harus dimiliki oleh para calon tenaga kerja. Seiring dengan kian terbuka pasar tenaga kerja, warga masyarakat tentu tidak cukup hanya dibekali dengan pendidikan dasar 9 tahun, sebagaimana yang diwajibkan dan telah disediakan oleh pemerintah. Para calon tenaga kerja harus membekali diri dengan pendidikan sampai pada level tertinggi, agar lebih mampu bersaing dengan sesama pencari kerja dari luar negeri. Dengan mengakses pendidikan sampai pada jenjang tertinggi, penguatan budaya wirausaha dan peningkatan wawasan usaha bisnis akan dapat lebih bisa diasah. Yang menjadi masalah adalah akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi di Indonesia

tergolong masih sangat rendah. Padahal berbagai kajian membuktikan bahwa latar belakang pendidikan berdampak pada orientasi wirausaha (Prianto, 2012). Itulah sebabnya, jumlah *pewirausaha* Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan dengan negara tetangga.

Prianto (2012) yang mengutip data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menyebutkan jumlah *pewirausaha* Indonesia per Januari 2012 mencapai 1,56%. Angka ini masih jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan jumlah *pewirausaha* di negara lain yang perekonomiannya jauh lebih kuat. Sebagai perbandingan, jumlah *pewirausaha* di Amerika mencapai 11%, Jepang dan China mencapai 10%, Singapura mencapai 7%; sedangkan Malaysia mencapai 5% dari total penduduk. Data lain dikutip oleh Prianto (2012) dari *The 2011 Legatum Prosperity Index*. Dari 110 negara di dunia; budaya kewirausahaan dan kesempatan berusaha di Indonesia berada pada peringkat 80. Peringkat kewirausahaan dan kesempatan berusaha di Indonesia ini ada di bawah negara-negara Asia Tenggara lainnya. Sebagai perbandingan, Viet-

nam berada pada peringkat 78, Phillipina peringkat 70, Thailand peringkat 53, Malaysia peringkat 36, dan Singapura peringkat 14.

Belum kuatnya budaya wirausaha di Indonesia dibandingkan dengan negara tetangga menyebabkan besarnya peluang usaha berpotensi akan dimanfaatkan oleh para *pewirausaha* dari luar negeri. Tingginya angka investasi asing yang masuk ke dalam negeri memang dipastikan akan memperkuat perekonomian Indonesia. Tetapi di sisi lain, semakin besarnya investor asing yang menanamkan kegiatannya di Indonesia juga mengindikasikan belum kuatnya kemampuan ekonomi dan budaya wirausaha di dalam negeri. Tabel 3 berikut ini menjelaskan kecenderungan tersebut.

Dilihat dari sisi pemanfaatan potensi ekonomi, data dari BKPM sebagaimana tertera pada tabel 3 menunjukkan bahwa hampir dua per tiga peluang usaha di Indonesia telah diambil oleh pelaku usaha dari luar, sedangkan pelaku usaha dari dalam negeri hanya memanfaatkan sepertiga potensi ekonomi. Selama dua tahun, kecenderungan tersebut

**Tabel 3**  
Total Investasi Triwulan I 2011-2012  
(dalam triliun rupiah)

Tahun	Sumber Investasi	Nilai Investasi	% Total Investasi	% Total PDB
2011	Modal Asing	39,5	72,62	0,51 (1,04)
	Modal Dalam Negeri	14,1	27,38	0,18 (0,72)
	<b>Investasi Total</b>	<b>53,6</b>	<b>100</b>	<b>0,69 (2,76)</b>
2012	Modal Asing	51,5	72,68	0,66 (2,64)
	Modal Dalam Negeri	19,7	27,32	0,25 (1,00)
	<b>Investasi Total</b>	<b>72,1</b>	<b>100</b>	<b>0,91 (3,64)</b>

Sumber: Data BKPM, *Investasi Asing Terus Tumbuh* dalam <http://m.okezone.com>, diakses 6 Maret 2013

Keterangan: Asumsi 1 USD = Rp. 9.500. Angka dalam kurung adalah proyeksi dalam setahun

terlihat tidak berubah. Bahkan, meskipun kecil; kecenderungan tersebut menunjukkan adanya penurunan. Harus diakui, fakta sebagaimana tersaji dalam tabel 3 sesungguhnya juga mencerminkan bahwa kita belum mampu menjadi tuan di negeri sendiri. Fakta ini sekali lagi juga mencerminkan bahwa ternyata budaya usaha masyarakat di dalam negeri masih kalah kuat dibandingkan dengan budaya usaha masyarakat di luar negeri.

Investasi asing yang besar memang berkontribusi pada besarnya produk domestik bruto (PDB), tetapi ia tidak selalu memperkuat produk nasional bruto (PNB). Mengapa demikian? Hal ini tidak lain karena keuntungan yang didapatkan para investor asing pada akhirnya akan dibawa pulang ke negara dimana ia berasal. PDB Indonesia dalam beberapa tahun ke depan bisa saja masuk 10 besar dunia sebagaimana diprediksikan oleh IMF, tetapi pada saat yang sama berita baik tersebut belum tentu akan berdampak signifikan terhadap peningkatan PNB. Sebab pada dasarnya PNB adalah dihitung dengan berbasis pada kegiatan produksi yang dilakukan oleh para pelaku usaha (warga) Indonesia, baik yang menanamkan usahanya di dalam negeri maupun di luar negeri. Besarnya konsumsi nasional yang menyumbang lebih dari 50% bagi terbentuknya PDB juga menjadi indikator yang nyata bahwa besarnya PDB Indonesia tidak serta merta akan berjalan paralel dengan besarnya PNB yang berbasis pada kegiatan produksi nasional.

PDB yang besar, tetapi sebagian besar ditopang oleh investor asing dan konsumsi nasional tidak selalu mencerminkan kualitas peningkatan PNB. Meskipun PDB Indonesia saat ini ada pada urutan 16 besar dunia, jauh

di atas Thailand (urutan 31), Malaysia (urutan 36), dan Singapura (urutan 38); namun kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia ternyata jauh di bawah negara tetangga tersebut. Pada tahun 2011, peringkat kualitas perekonomian Indonesia berada pada posisi 44. Peringkat kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di bawah Phillipina peringkat 43, Vietnam peringkat 40, Malaysia berada pada peringkat 17, Thailand peringkat 13, dan Singapura peringkat 1. Di Asia Tenggara kualitas perekonomian Indonesia hanya unggul dari Kamboja yang berada pada peringkat 61 (<http://www.prosperity.com/rankings.aspx>, diakses 12 Maret 2012).

Mengapa tingginya PDB dan pendapatan per kapita berbanding terbalik dengan rendahnya kualitas pertumbuhan ekonomi? Mengacu pada data yang disajikan The 2011 Legatum Prosperity Index, ada beberapa indikator yang menyebabkan kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia tertinggal dengan beberapa negara tetangga. Tabel 4 berikut ini memberikan penjelasan tentang hal tersebut.

Mengacu pada tabel 4, untuk indikator pertama, kegiatan ekonomi yang masih didominasi kegiatan konsumsi sebagai penyumbang utama terbentuknya PDB menyebabkan kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di bawah negara tetangga. Negara kita kuat di sektor konsumsi, karena memang dianugerahi jumlah penduduk terbesar di tingkat kawasan; tetapi kegiatan ekonomi nasional kita lemah di sektor produksi nasional. Komposisi modal asing yang mencapai dua per tiga dari total investasi memberikan gambaran tentang rendahnya kegiatan produksi nasional. Bahasa gampangnya, kita

**Tabel 4**  
**Peringkat Kualitas Perekonomian Beberapa Negara Asean**  
**Dari Beberapa Indikator Terpilih Tahun 2011**  
**(Dari 110 Negara di Dunia)**

Peringkat Kualitas Pertumbuhan Ekonomi	Negara	Indikator				
		I	II	III	IV	V
16	Singapura	1	14	13	51	20
43	Malaysia	17	36	35	46	46
45	Thailand	13	53	57	55	70
62	Vietnam	40	78	58	82	73
66	Philipina	43	70	59	60	82
70	Indonesia	44	80	78	66	83

Sumber: <http://www.prosperity.com/rankings.aspx>, diakses 10 Maret 2012

**Keterangan:**

I = Aktifitas Ekonomi

II = Kewirausahaan dan Peluang Kerja

III = Kualitas Layanan Pemerintah

IV = Layanan Pendidikan

V = Kesehatan Masyarakat

terlihat banyak memiliki uang; tetapi kemampuan kita untuk memutar uang rendah. Modal yang masuk ke dalam negeri sebagian besar diputar oleh para pelaku usaha dari luar (investor asing). Kita juga memiliki kekayaan alam yang melimpah, tetapi kapasitas kita untuk mengolah sumber alam terbatas. Kekayaan alam kita yang melimpah dalam skala besar juga lebih banyak dikelola oleh investor asing. Inilah yang menyebabkan kualitas perekonomian nasional juga rendah, meskipun secara kuantitas sangat besar.

Indikator kedua, belum kuatnya sektor produksi nasional memiliki hubungan interdependensi dengan belum kuatnya budaya kewirausahaan. Belum kuatnya budaya wirausaha warga masyarakat menyebabkan ketergantungan mereka pada penyedia lapangan kerja menjadi sangat tinggi. Masyarakat dengan budaya wirausaha yang rendah akan mengantarkan mereka menjadi

kelompok pencari kerja, bukan pencipta lapangan kerja. Dengan kata lain, warga masyarakat dengan budaya wirausaha yang rendah dipastikan juga memiliki peluang berusaha dan peluang kerja yang lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang memiliki budaya wirausaha yang kuat. Belum kuatnya budaya wirausaha di tengah-tengah kehidupan masyarakat inilah yang menyebabkan kualitas pertumbuhan ekonomi kita menjadi tertinggal dibandingkan dengan beberapa negara tetangga.

Indikator ketiga, tata penyelenggaraan negara kita juga dinilai tertinggal dibandingkan dengan negara tetangga. Kualitas tata penyelenggaraan negara diukur dari akuntabilitas dan efektifitas penyelenggaraan tata pemerintahan, partisipasi politik dan penyelenggaraan pemilu yang jujur, serta penegakan hukum. Harus kita akui, hingga saat ini tata penyelenggaraan pemerintahan



kita masih banyak dihiasi dengan cerita tentang layanan publik yang berbelit dan diikuti dengan biaya siluman yang menyebabkan adanya ekonomi biaya tinggi. Pemerintah memang sudah sekian lama berusaha membudayakan layanan prima di sektor publik. Tetapi untuk aktifitas layanan publik, hingga kini di masyarakat masih nyaring terdengar jargon "Kalau bisa diperlambat mengapa harus dipercepat". Biaya siluman yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi akan menjadi penentu apakah layanan publik bisa cepat selesai atau lambat selesai. Belum lagi menyangkut efektifitas kegiatan layanan yang dinilai belum maksimal ikut menjadi biang keladi kegiatan layanan publik oleh pemerintah menjadi boros waktu dan biaya.

Mengacu pada data yang dikeluarkan oleh The Global Competitiveness Report 2007-2008 dalam WEF (2007), koefisien biaya dari peraturan pemerintah sebesar 3,9; jauh di bawah Malaysia (4,6) dan Singapura (5,3). Selanjutnya juga dikemukakan peringkat Indonesia mengenai prosedur bea cukai ada pada posisi 101 dari 131 negara. Data yang dikemukakan oleh Bank Dunia dalam World Government Indicators (2010), yang mengkaji tentang efektifitas layanan oleh pemerintah menempatkan Indonesia pada posisi 80. Bandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Philipina (72), Thailand (62), Brunei Darussalam (34), Malaysia (28), dan Singapura (1). Data-data ini menunjukkan bahwa tata penyelenggaraan negara kita belum dinilai baik oleh para pebisnis global. Indeks persepsi korupsi Indonesia hingga kini juga masih sangat tinggi, dan menempatkan Indonesia sebagai negara korup peringkat 118 dari 176 negara. Peringkat korupsi Indonesia ada di bawah

Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, dan Philipina (<http://www.ti.or.id/indes.php>, diakses 14 Maret 2013). Kesemuanya ini berkontribusi terhadap rendahnya kualitas pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Indikator keempat, layanan pendidikan di Indonesia, terutama pendidikan tinggi; diharapkan dapat diakses lebih luas oleh masyarakat. Ada upaya dan program dari pemerintah untuk meningkatkan akses ke pendidikan tinggi. Namun harus diakui bahwa hingga kini belum semua warga masyarakat mampu mengakses layanan pendidikan secara setara. Meskipun ada program wajib belajar 9 tahun, tetapi layanan pendidikan di Indonesia di atas pendidikan dasar dinilai belum memenuhi asas imparial. Tidak semua warga masyarakat mendapatkan kesempatan yang setara untuk mengakses layanan pendidikan di atas pendidikan tingkat dasar. Masih banyak warga masyarakat yang tidak mampu mengakses layanan pendidikan yang bermutu karena faktor biaya yang kian mahal. Jawa Pos bahkan melaporkan bahwa biaya pendidikan tinggi di Indonesia dalam beberapa kasus dinilai lebih mahal dibandingkan dengan diluarnegeri, dan hal ini menyebabkan semakin banyak warga masyarakat lapis bawah yang tidak mampu mengaksesnya (Jawa Pos, 7 Maret 2013).

Untuk layanan pendidikan yang berkualitas, masih terjadi disparitas yang tinggi antara pendidikan berkualitas yang berada di Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur, Jawa dan luar Jawa; di perkotaan dan di pinggiran. Kondisi ini menyebabkan ketersediaan sumber daya manusia terdidik dan terampil kebanyakan ada di wilayah Indonesia bagian barat, di Jawa, di perkotaan dan belum

menyebar merata di semua wilayah, termasuk wilayah Indonesia Timur dan wilayah pinggiran. Ketersediaan jumlah tenaga kerja terdidik dan terlatih merupakan salah satu prasyarat utama untuk berkembangnya kegiatan investasi dan usaha bisnis. Hal inilah yang menyebabkan kegiatan investasi dan usaha bisnis kebanyakan berada di Indonesia bagian barat, di Jawa, di wilayah perkotaan; dan belum menyebar ke semua wilayah. Tanpa disadari, kondisi ini ikut menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial ekonomi antara wilayah Indonesia barat dengan Indonesia timur, antara Jawa dan luar Jawa, antara desa dan kota. Koefisien gini ratio pun meningkat dari 0,33 pada tahun 2004 menjadi 0,41 pada tahun 2011 ([analisedaily.com](http://analisedaily.com), diakses 7 Maret 2013). Singkatnya, layanan pendidikan berkualitas yang belum bisa dinikmati semua warga masyarakat secara merata juga berkontribusi pada rendahnya kualitas pertumbuhan ekonomi.

Indikator kelima, kualitas kesehatan masyarakat Indonesia secara umum berada di bawah Philipina, Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Singapura. Kualitas kesehatan masyarakat jelas sangat berpengaruh terhadap tingkat produktifitas mereka. Kemampuan bekerja dan produktifitas kerja dari penduduk merupakan salah satu variabel yang mampu menarik minat para investor untuk menanamkan modalnya. Kegiatan usaha bisnis akan semakin kompetitif apabila didukung oleh tenaga kerja yang memiliki tingkat produktifitas yang tinggi. Rendahnya produktifitas kerja yang disebabkan oleh rendahnya kualitas kesehatan masyarakat juga tidak dapat dipisahkan dari tingkat pendidikan. Masyarakat yang mendapatkan layanan pendidikan yang baik akan mengantarkan mereka menjadi tenaga terdidik dan terampil, sehingga mereka akan menjadi

lebih produktif. Dengan lebih produktif, maka kemampuan ekonomi mereka juga akan meningkat. Meningkatnya kemampuan ekonomi akhirnya memungkinkan mereka untuk meningkatkan kualitas kesehatannya. Dengan demikian jelaslah bahwa kualitas pendidikan masyarakat pada akhirnya juga berkontribusi terhadap terbentuknya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Kecuali untuk indikator pendidikan yang menempatkan Indonesia di atas Vietnam, indikator aktifitas ekonomi, indikator budaya wirausaha dan peluang usaha, indikator kualitas tata penyelenggaraan negara, dan indikator kualitas kesehatan masyarakat Indonesia berada di bawah beberapa negara tetangga. Tampaknya, kuatnya potensi ekonomi Indonesia dilihat dari besaran PDB dan rata-rata pendapatan per kapita lebih banyak ditopang oleh besarnya jumlah penduduk, luasnya wilayah Indonesia, dan melimpahnya sumber daya alam. Kekayaan sumber daya alam dan besarnya jumlah penduduk tentunya masih harus diikuti dengan layanan pendidikan yang berkualitas dan dapat dinikmati semua warga secara merata. Pemerintah juga dituntut untuk terus mampu menciptakan layanan publik yang transparan dan akuntabel, termasuk layanan di bidang kesehatan. Tata penyelenggaraan negara juga harus mampu menciptakan kepastian dan tertib hukum. Kesemuanya ini dibutuhkan untuk meningkatkan produktifitas nasional guna terciptanya pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas.

Belum maksimalnya kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia juga dapat dilihat dari komponen utama pembentuk PDB beserta laju pertumbuhannya, sebagaimana tampak pada tabel 5 berikut ini.

**Tabel 5**  
Laju Pertumbuhan Komponen Pembentuk PDB

Pengeluaran	Distribusi (%)			Laju Pertumbuhan (%)		
	2010	2011	2012	T.III-2011 Thd T.III-2010	T.III-2012 Thd T.III-2011	Laju Pertumbuh (yoy)
Konsumsi Masyarakat	56,6	54,6	54,8	2,71	5,68	3,12
Pengeluaran Pemerintah	9,0	9,0	8,2	-0,07	-3,22	-0,26
Investasi	32,1	32,0	33,1	2,94	10,02	2,43
Ekspor	24,6	26,3	23,1	-0,21	-2,78	-1,38
Impor	22,9	24,9	23,7	-0,36	-0,54	-0,20
PDB Total	100	100	100	3,21	6,17	

Sumber: BPS sampai dengan Triwulan III (data diolah)

Berdasarkan tabel 5, konsumsi masyarakat dan investasi merupakan dua komponen utama pembentuk PDB dan memiliki laju pertumbuhan positif. Sedangkan komponen pengeluaran pemerintah, ekspor, dan impor justru menunjukkan laju pertumbuhan negatif. Pengeluaran konsumsi masyarakat yang proporsinya lebih dari 50%, dan pada saat yang sama diikuti dengan pertumbuhan negatif dari pengeluaran pemerintah, ekspor, dan impor bisa menjadi sinyal awal bahwa produktifitas nasional belum mampu bekerja secara optimal. Sekali lagi, hal ini adalah merupakan pertanda bahwa kehidupan di masyarakat kita masih didominasi dengan budaya konsumtif, dan belum kuat dengan budaya produktif; meskipun melalui mekanisme multiplier effect kegiatan konsumsi juga mampu menggerakkan aktifitas ekonomi, dan kemudian merangsang terciptanya pertumbuhan ekonomi.

Sebagai dampak dari perilaku produktif yang belum kokoh maka angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang diikuti dengan menggelembungnya PDB menjadi kurang

mampu memberikan tekanan yang signifikan bagi turunnya angka kemiskinan. Data yang disajikan oleh BPS menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin pada bulan September 2012 tercatat sebesar 28,59 juta orang atau sebesar 11,66% dari keseluruhan jumlah penduduk (Berita Resmi Statistik No. 06/01/Th.XVI, 2 Januari 2013). Bahkan semakin membesarnya volume ekonomi nasional ternyata masih diikuti dengan kian melebarinya kesenjangan ekonomi. Hal ini terlihat dari meningkatnya koefisien gini ratio, bila koefisien gini ratio tahun 2004 sebesar 0,33 meningkat menjadi 0,41 untuk tahun 2011 (analisdaily.com, diakses 7 Maret 2013). Semakin lebarnya kesenjangan ekonomi juga menguatkan indikasi bahwa pelaku usaha di lapis bawah tidak serta merta mampu ikut menikmati membesarnya peluang kegiatan usaha seiring dengan semakin membesarnya potensi perekonomian nasional.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup tinggi seharusnya juga diikuti dengan semakin terbukanya peluang kerja. Sejauh ini, permintaan pasar tenaga kerja di Indonesia mencapai 113 juta orang. Sedangkan

ketersediaan SDM yang terampil berada pada kisaran angka 104 juta orang (merdeka.com, diakses 5 Maret 2012). Memperhatikan kesenjangan antarkebutuhan tenaga terampil dan ketersediaan tenaga terampil serta rendahnya produktifitas nasional, ancaman pengangguran yang semakin membesar tampak di depan mata. Akibatnya, tingkat pengangguran di Indonesia masih belum segera bisa ditekan. Besarnya pengangguran juga berdampak secara langsung pada tingginya angka kemiskinan. Artinya, tingginya pengangguran juga berdampak pada daya saing bangsa. Sebagai gambaran komposisi pengangguran di Indonesia sampai dengan pertengahan tahun 2011 tampak pada tabel 6.

Tata penyelenggaraan negara yang belum optimal menyebabkan penegakan hukum menjadi lemah. Lemahnya penegakan hukum ikut memicu terjadinya penyelewengan oleh aparaturnegara yang ditandai dengan perilaku korup. Hingga saat ini Indonesia masih ditempatkan oleh berbagai lembaga internasional sebagai negara yang korup. Dampak ikutan yang ditimbulkan dari situasi tersebut adalah terjadinya ekonomi biayatinggi

(high cost economy). Inilah yang menyebabkan daya saing Indonesia dari tahun ke tahun nyaris tidak beranjak dari peringkat bawah. Tahun 2012 daya saing Indonesia masih berada di urutan 50 dari 142 negara di dunia. Indonesia juga masih dinilai World Competitiveness Year book kurang kompetitif lantaran masih adanya masalah efisiensi bisnis dan pemerintahan. Menurut data dari World Bank, iklim investasi Indonesia berada pada peringkat 121 dari 183 negara di dunia. Daya saing yang kurang kuat menyebabkan iklim investasi menjadi kurang menarik, dan dampak ikutan berikutnya adalah produktifitas nasional menjadi rendah (<http://portalkbr.com>, diakses 10 Maret 2013).

Rendahnya tingkat produktifitas dan tingginya tingkat pengangguran secara bersama-sama mencerminkan rendahnya produktifitas nasional dan daya saing bangsa. Ada hubungan interdependensi antara daya saing bangsa, kualitas tata penyelenggaraan negara yang baik, kualitas layanan publik, penegakan hukum, tingkat korupsi, tingkat pendidikan masyarakat, kualitas kesehatan masyarakat, tingkat efisiensi bisnis, tingkat

**Tabel 6**  
Pengangguran Terbuka Nasional Menurut Pendidikan dan Lokasi  
Per Agustus 2011

Nomor	Pendidikan	Daerah		Jumlah
		Perkotaan	Pedesaan	
1	≤ SD	970.078	1.027.277	1.997.355
2	SMTP	1.064.536	826.219	1.890.755
3	SMTA Umum	1.355.019	688.074	2.043.093
4	SMTA Kejuruan	805.610	226.243	1.031.853
5	Diploma I/II/III/Akademi	189.677	55.010	244.687
6	Universitas	341.291	151.052	492.343
	<b>Jumlah</b>	<b>4.726.211</b>	<b>2.973.875</b>	<b>7.700.086</b>

Sumber: Pusdatinaker.balifto.depnakertrans.go.id (diakses 21 Maret 2012)

pengangguran, kualitas pertumbuhan ekonomi nasional, dan tingkat produktifitas nasional.

#### IV. PROBLEM DAYA SAING BANGSA

Di kawasan Asean, daya saing negara kita dalam tiga tahun terakhir menunjukkan perubahan yang menunjukkan kecenderungan penurunan, sehingga belum mampu mampu beranjak dari posisi lima besar. Semakin kecil angka indeks menunjukkan daya saing yang tinggi, dan semakin besar angka indeks menunjukkan daya saing yang rendah. Tabel 7 berikut ini menjelaskan kecenderungan tersebut.

**Tabel 7**  
Peringkat Daya Saing Negara Asean Tahun 2008 dan 2012  
(Dari 142 Negara di Dunia)

No	Negara	2008	2012	Perubahan
1	Singapura	5	2	3
2	Malaysia	21	25	-4
3	Brunei Darusalam	39	28	11
4	Thailand	34	38	-4
5	Indonesia	55	50	5
6	Philipina	71	65	-6
7	Vietnam	70	75	-5

Sumber: Penurunan Daya Saing Indonesia Tahun 2012, dalam <http://bapenas.go.id/blog>, diakses 10 Maret 2013; Diadaptasi dari *Global Competitiveness Report 2012-2013*, WEF (2012)

**Tabel 8**  
Peringkat Daya Saing Indonesia Dalam Tiga Indikator 2008 – 2012  
(Dari 142 Negara di Dunia)

Indikator	2008	2009	2010	2011	2012
Peringkat Daya Saing	55	54	44	46	50
Indikator Persyaratan Dasar	76	70	60	53	58
Indikator Penopang Efisiensi	49	50	51	56	58
Indikator Faktor Inovasi dan Kecanggihan	45	40	37	41	40

Sumber: Penurunan Daya Saing Indonesia Tahun 2012, dalam <http://bapenas.go.id/tcoo>, Diadaptasi dari *Global Competitiveness Report 2012-2013*, WEF (2012)

Khusus daya saing Indonesia, paparan lebih terperinci tampak pada tabel 8. Dari tabel tersebut terlihat dalam tiga tahun terakhir ada gejala penurunan.

Indikator persyaratan dasar, penopang efisiensi, serta faktor inovasi dan kecanggihan merupakan prasyarat utama bagi daya saing sebuah negara untuk menjadi negara maju. Dalam dua tahun terakhir, indikator persyaratan dasar dan indikator penopang efisiensi menunjukkan adanya penurunan. Dengan indikator utama yang masih berada pada peringkat di atas 50, dipastikan masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan daya saing. Indikator apa saja yang harus diperbaiki agar daya saing bangsa dalam masa mendatang menjadi lebih kuat dapat dilihat dari tabel 9.

Berdasarkan tabel 9, terdapat tiga pilar daya saing yang dalam dua tahun terakhir naik peringkat, yaitu kesiapan teknologi, efisiensi pasar barang, dan kecanggihan bisnis. Meskipun 3 pilar tersebut naik peringkat, tetapi kesemuanya masih berperingkat rendah; dan itu berarti juga menunjukkan daya saing bangsa kita masih rendah pula. Yang justru perlu mendapatkan

perhatian serius adalah ada 9 pilar daya saing yang justru turun peringkat. Penurunan peringkat paling menyolok ada pada pilar efisiensi pasar tenaga kerja (turun 26 peringkat). Pilar efisiensi pasar tenaga kerja benar-benar dalam kondisi "SOS" atau darurat, karena selain berperingkat paling rendah penurunan peringkatnya juga paling besar. Hal ini mengindikasikan pasar tenaga kerja kita benar-benar kurang kompetitif dibandingkan dengan negara lain.

Mengacu pada data jumlah pengangguran tahun 2011, pasar tenaga kerja kita sekitar 90% didominasi oleh mereka yang berpendidikan SD sampai dengan SMA atau SMK, dan hanya sekitar 10% yang berpendidikan akademik atau universitas (<http://pusdatinaker.balitfo.depnakertrans.go.id>, diakses 21 Maret 2012). Bersamaan dengan itu, ada 2 pilar lain yang mengalami penurunan cukup signifikan, yaitu pilar pendidikan tinggi dan pelatihan serta pilar kesehatan masyarakat dan pendidikan dasar. Selain mengalami penurunan, dua pilar ini berperingkat sangat rendah. Dari sini terlihat adanya keterkaitan antara dimensi kualitas kesehatan, pendidikan, dan pelatihan dengan kualitas tenaga kerja. Kualitas kesehatan, pendidikan, dan pelatihan yang kurang baik menyebabkan rendahnya daya saing tenaga kerja, dan kesemuanya ini berdampak pada efisiensi pasar tenaga kerja yang rendah pula.

Pilar daya saing lain yang meliputi kesiapan teknologi, efisiensi pasar barang, kecanggihan

**Tabel 9**  
Peringkat Daya Saing Menurut Pilar Daya Saing Tahun 2011 – 2012  
(Dari 142 Negara di Dunia)

No	Pilar Daya Saing	2011	2012	Perubahan
1	Kesiapan teknologi	94	85	9
2	Efisiensi pasar barang	67	63	4
3	Kecanggihan bisnis	45	42	3
4	Kelembagaan	71	72	-1
5	Kenajauan pasar uang	69	70	-1
6	Besar pasar	15	16	-1
7	Infrastruktur	76	78	-2
8	Lingkungan ekonomi makro	23	25	-2
9	Inovasi	36	39	-3
10	Pendidikan tinggi dan pelatihan	69	73	-4
11	Kesehatan dan pendidikan dasar	64	70	-6
12	Efisiensi pasar tenaga kerja	94	120	-26

Sumber: Penurunan Daya Saing Indonesia Tahun 2012, dalam <http://bapenas.go.id/blog>, diakses 10 Maret 2013; Diadaptasi dari *Global Competitiveness Report 2012-2013*, WEF (2012)

bisnis, kelembagaan, kemajuan pasar uang, ketersediaan sarana infrastruktur, dan inovasi rata-rata berada pada peringkat 64. Berbagai indikator daya saing lainnya yang perlu mendapatkan perhatian serius karena memiliki peringkat yang rendah dan pada saat yang sama sedang mengalami penurunan peringkat yang cukup besar adalah: (1) layanan pemerintah untuk mendorong bisnis, turun 21 peringkat; (2) neraca anggaran dan belanja pemerintah, turun 15 peringkat; (3) patent per sejuta penduduk, turun 15 peringkat; (4) praktek suap, kriminal terorganisasi, dampak teror terhadap bisnis, kompetisi lokal, dan efek perpajakan; masing-masing turun 7 peringkat; (5) infrastruktur umum, turun 10 peringkat; (6) transportasi udara, turun 9 peringkat; (6) akses internet di sekolah, turun 7 peringkat; (7) partisipasi pendidikan menengah, turun 4 peringkat; (8) upah dan produktifitas, turun 6 peringkat. Penurunan peringkat ini jelas mengindikasikan bahwa

berbagai variabel pendukung kegiatan ekonomis nasional semakin kalah bersaing bila dibandingkan dengan negara kompetitor.

Kualitas infrastruktur merupakan salah satu pilar daya saing yang paling banyak dikaji dan dijadikan pertimbangan utama bagi para pebisnis untuk menanamkan kegiatan usahanya. Rendahnya kualitas infrastruktur sudah terjadi sejak beberapa tahun yang lalu. Hal ini dapat dilihat dari laporan *Global Competitiveness Report 2010-2011* (WEF, 2010), yang menyatakan bahwa dari 139 negara di dunia yang diperingkat, kualitas infrastruktur Indonesia menempati peringkat 82. Bandingkan dengan Malaysia di peringkat 30, Thailand peringkat 35, Turki peringkat 56, Brasil peringkat 62, dan Meksiko peringkat 75. Infrastruktur Indonesia nyaris disalipi oleh Vietnam yang berada pada peringkat 83. Infrastruktur terbaik di kawasan Asean adalah Singapura berada di peringkat 5. Tabel 10 menggambarkan rincian kualitas infrastruktur di Indonesia, dan kesemuanya masih berperingkat rendah.

Tabel 10  
Peringkat Infrastruktur di Indonesia Tahun 2010-2011  
(Dari 139 Negara di Dunia)

No	Rincian Infrastruktur	Peringkat
1	Pilar Infrastruktur	82
2	Kualitas infrastruktur umum	90
3	Kualitas jalan	84
4	Kualitas infrastruktur kereta api	96
5	Kualitas infrastruktur pelabuhan laut	56
6	Kualitas infrastruktur transportasi udara	21
7	Kualitas pasokan listrik	97
8	Sambungan telepon tetap	82
9	Pelanggan telepon gerak	98
10	Tempat duduk pesawat	69

Sumber: Mempercepat Bangunan Infrastruktur, dalam <http://bapenas.go.id/blog>. Diadaptasi dari *Global Competitiveness Report 2010-2011*. WEF (2010)

Sebagaimana pilar daya saing lainnya, keterbatasan infrastruktur baik dari sisi kuantitas dan kualitas menyebabkan terjadinya defisiensi ekonomi dan menghambat laju produktivitas nasional. Rendahnya kualitas infrastruktur nasional dibandingkan dengan infrastruktur negara lain menyebabkan daya saing nasional dibandingkan negara lain menjadi rendah. Hal ini menjadi tantangan besar perekonomian nasional di tengah-tengah besarnya potensi ekonomi dalam negeri.

Dari 12 pilar daya saing, hanya ada 2 pilar daya saing yang memiliki peringkat setara dengan peringkat PDB Indonesia di dunia, yaitu pilar besar pasar (peringkat 16) dan pilar lingkungan ekonomi makro (peringkat 25). Besar pasar dalam negeri menentukan ukuran ekonomi nasional dilihat besaran konsumsi nasional. Dengan jumlah penduduk terbesar di kawasan Asean menjadikan ukuran ekonomi nasional berada pada peringkat teratas dibandingkan dengan ukuran ekonomi negara tetangga. Itulah sebabnya, pilar besar pasar Indonesia memiliki peringkat daya saing teratas di kawasan Asean. Ukuran pasar yang besar dan potensi sumber daya alam yang melimpah ikut menentukan kualitas ekonomi makro. Dua pilar ini pula yang saat ini menjadi pendukung utama pembentuk PDB, dan menempatkan Indonesia masuk 20 besar kekuatan ekonomi dunia dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil. Berkah ukuran pasar dan potensi sumber daya alam yang melimpah inilah yang menyebabkan indikator makro ekonomi Indonesia senantiasa tampak moncer, meskipun berbagai pilar daya saing berperingkat rendah.

Mengapa disaat Indonesia menjadi 20 besar kekuatan ekonomi dunia, dengan jumlah PDB hampir 1 triliun USD, dan rata-rata pendapatan per kapita mencapai 3.660 USD; tetapi pada saat yang sama masih harus menanggung penduduk miskin dan tingkat pengangguran yang sangat besar, serta kesenjangan sosial ekonomi yang kian melebar? Sebagaimana dilaporkan oleh BPS bahwa saat ini jumlah penduduk miskin sebesar 28,59 juta orang atau sebesar 11,66% dari keseluruhan jumlah penduduk (Berita Resmi Statistik No. 06/01/Th.XVI, 2 Januari 2013). Selanjutnya data dari Pusdatinaker (2011), sebagaimana dikutip Prianto (2012) mencatat jumlah angkatan kerja tercatat 117.370.485 orang, sedangkan yang bekerja tercatat 109.670.399 orang. Dengan demikian angka pengangguran terbuka tercatat sebesar 7,7 juta orang. Selain masalah pengangguran yang besar, kesenjangan sosial ekonomi di Indonesia juga kian melebar. Hal ini terlihat dari meningkatnya koefisien gini ratio. Bila koefisien gini ratio tahun 2004 sebesar 0,33; maka pada tahun 2011 meningkat menjadi 0,41 (analisa daily.com, diakses 7 Maret 2013). Mengapa situasi kontradiktif ini bisa terjadi?

PDB dibagi dengan jumlah penduduk menentukan besaran pendapatan per kapita. Timbulnya fakta kontradiktif antara besaran PDB dan pendapatan per kapita di satu pihak dengan kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial ekonomi di pihak lain kian menegaskan adanya problem serius dengan persoalan daya saing bangsa. Jumlah penduduk miskin dan pengangguran yang besar yang dibarengi dengan kesenjangan sosial ekonomi yang kian lebar mengindikasikan tidak semua penduduk mampu mengakses sumber ekonomi. Berbagai kajian membuktikan bahwa

rendahnya tingkat pendidikan dan ketrampilan penduduk merupakan penyebab utama ketidakmampuan mereka dalam mengakses berbagai sumber ekonomi.

Kajian yang dilakukan Prianto (2012) juga membuktikan bahwa rendahnya pendidikan penduduk menyebabkan kemampuan berwirauaha mereka menjadi rendah. Rendahnya kemampuan berwirausaha penduduk menyebabkan kemampuan mereka untuk mengoptimalkan potensi ekonomi menjadi rendah. Artinya, sebesar apa pun potensi ekonomi suatu negara tetapi bila negara tersebut dihuni oleh penduduk dengan tingkat pendidikan yang rendah; maka potensi ekonomi yang besar itu pun menjadi kurang bermakna. Bahkan apabila tidak segera disadari, potensi ekonomi yang besar itu bisa saja menjadi layaknya sebuah "candu", sebagai sebuah asesori untuk keperluan puja puji; dan seringkali bisa meninabobokan anak negeri. Sebagai warga dari bangsa ini, kita sudah terlalu sering disirami puja pujitentang negeri kita yang besar, kaya raya, gemah ripah loh jinawi, murah sandang pangan, dan seterusnya; tetapi kondisi riil yang terjadi seringkali berbalikan dengan semuanya itu.

Sejak jaman nenek moyang kita dininabobokan dengan puja pujitentang negeri kita yang kaya raya sebagaimana layaknya negeri surga. Sebagian kaum penggiat seni menyatakan tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu dengan mudah menjadi tetanaman. Tetapi kelak terbukti, bahwa negeri surga yang kita dengungkan itu ternyata tidak selalu mampu memancarkan aroma surgawinya karena tingkat pendidikan para penduduknya yang terbatas. Dan akhirnya sama-sama kita lihat, predikat negeri surga menampakkan

gejala paradoks: angka kemiskinan dan pengangguran masih sangat besar, kesenjangan sosial ekonomi kian melebar, perilaku sebagian penduduk menjadi sangat kasar, emosi masyarakat mudah terbakar, dan dalam batas tertentu dengan mudah kita menyaksikan perilaku masyarakat kita menjadi bersifat barbar.

Selain ukuran skala ekonomi yang besar, dan didukung dengan potensi kekayaan alam yang melimpah, Indonesia juga masih dianugerahi dengan mayoritas penduduk yang masuk dalam kategori usia muda, usia kerja. Sayang mayoritas penduduk hanya berlatar pendidikan sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah atas. Sampai saat ini proporsi lulusan sekolah menengah atas yang melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi juga masih rendah. Hal inilah yang menyebabkan pilar efisiensi pasar kerja di Indonesia nyaris berada di peringkat terbawah (peringkat 120 dari 142 negara di dunia).

Di berbagai aktifitas ekonomi, mayoritas penduduk Indonesia bekerja pada posisi pekerjaan menengah ke bawah akibat

rendahnya tingkat daya saing. Sebaliknya, pada posisi pekerjaan menengah ke atas diisi oleh para profesional dari luar. Sudah bukan rahasia lagi, bangsa kita terkenal di dunia sebagai pengekspor tenaga kerja untuk menduduki posisi pekerjaan sebagai tukang, kuli, dan pembantu rumah tangga. Belum banyak TKI di luar negeri yang bekerja sebagai tenaga terampil di berbagai usaha bisnis multinasional. Pada saat yang sama, kita banyak mengimpor para profesional untuk menduduki posisi pekerjaan di level menengah ke atas. Mayoritas warga masyarakat yang berpendidikan rendah menyebabkan bangsa kita seolah-olah belum bisa menjadi tuan di negeri sendiri. Jangankan menjadi tuan, sekedar menjadi pembantu rumah tangga pun sebagian besar warga kita harus merantau ke negeri orang.

Daya saing bangsa yang rendah menyebabkan indeks kinerja arus masuk PMA dan indeks potensi arus masuk PMA di Indonesia berada pada peringkat terendah dibandingkan dengan negara tetangga. Tabel 11 berikut ini menggambarkan peringkat Indonesia dibandingkan dengan negara tetangga.

**Tabel 11**  
Peringkat Indonesia menurut Indeks Kinerja dan Potensi Arus Masuk PMA (Dari 141 Negara di Dunia)

Negara	Indeks Kinerja Arus Masuk PMA			Indeks Potensi Arus Masuk PMA		
	2004	2005	2006	2000	2004	2005
Indonesia	136	106	95	76	103	100
Brunei Darusalam	2	2	51	35	50	50
Malaysia	62	64	62	31	35	35
Philipina	107	109	102	61	71	74
Thailand	60	49	52	53	59	62
Vietnam	55	58	78	83	80	80
Singapura	6	6	5	2	2	2

Sumber: UNCTAD (2006,2007)

Berdasarkan tabel 11 terlihat, meskipun Indonesia sangat unggul pada pilar besar pasar; namun keunggulan itu ternyata tidak cukup mampu menarik minat investor asing untuk menanamkan investasinya dalam jumlah yang masif. Rendahnya berbagai pilar daya saing nasional menjadi penyebab utama rendahnya peringkat indeks kinerja dan potensi arus masuk PMA.

World Economic Forum, WEF (2007) menjelaskan ada banyak variabel yang menjadi kendala dalam melakukan kegiatan bisnis di Indonesia. Berikut ini adalah beberapa masalah penghambat kegiatan usaha bisnis di Indonesia (urutan dari masalah terbesar menuju ke terkecil): infrastruktur yang buruk, birokrasi tidak efisien, akses terbatas untuk pendanaan, kebijakan pemerintah tidak stabil, peraturan ketenagakerjaan yang restratif, regulasi perpajakan tidak kondusif, keterbatasan tenaga kerja terdidik, inflasi, dan korupsi. WEF (2007) juga melaporkan, dari 131 negara di dunia yang dijadikan sampel; perlindungan bisnis di Indonesia oleh aparat keamanan berada pada peringkat 93. Dengan demikian ada begitu banyak pekerjaan yang harus diselesaikan pemerintah untuk membuat iklim kegiatan ekonomi di Indonesia menjadi lebih baik. Sekali lagi, Indonesia masih beruntung karena dianugerahi Tuhan berupa pilar besar pasar dan sumber alam yang melimpah.

#### V. CATATAN PENUTUP

Ketika daya saing bangsa disebut sebagai sebuah persoalan, maka pihak pertama yang paling punya kapasitas untuk mengatasinya tidak lain adalah pemerintah beserta semua komponen penyelenggara negara yang ada di dalamnya. Pemerintah adalah satu-satunya

institusi yang memiliki otoritas untuk membuat tata aturan main dan kebijakan yang memungkinkan sistem hukum, layanan publik, sistem pendidikan, dan semua aktifitas ekonomi dapat berjalan sesuai dengan koridor yang berlaku. Melalui otoritas dan peraturan yang dibuatnya, pemerintah bahkan mampu mengintrodusir budaya baru yang mendukung kegiatan ekonomi produktif.

Tidak ada pihak mana pun yang paling mampu mempengaruhi besaran daya saing bangsa, kecuali pihak pemerintah. Jumlah penduduk yang besar dan berusia muda, serta kekayaan alam yang melimpah ruah sesungguhnya merupakan berkah dan kemurahan Tuhan; dan dua variabel itu di luar kontrol pemerintah. Bahwa kemudian dua variabel tersebut pada saat ini menjadi penopang utama besaran PDB (dan secara otomatis menentukan besaran rata-rata pendapatan per kapita) hingga masuk 20 besar dunia; apakah tidak malu kepada Tuhan kalau capaian itu kemudian kita klaim sebagai sebuah keberhasilan dalam membangun perekonomian nasional?

Ketika hampir semua pilar daya saing bangsa dan berbagai variabel pendukung kegiatan usaha bisnis dalam kondisi tertinggal jauh dibandingkan dengan negara tetangga, dari titik mana pemerintah harus melakukan intervensi perbaikan? Pertama-tama kita harus membuat keyakinan bersama, bahwa pesawat super jumbo yang bernama "Indonesia" memiliki kesempatan untuk terbang tinggi. Sang super jumbo akan terbang tinggi bila "kapten pilot", "teknisi pesawat", "para awak kabin", dengan didukung semua "penumpang" memiliki kemauan dan kemampuan untuk menjalankan pesawat

menuju dengan "arah" yang hendak dituju, sesuai dengan "rute" yang telah disepakati. Sang super jumbo berpotensi untuk terbang tinggi, karena didukung oleh "mesin" sumber daya alam yang melimpah dan ukuran pasar yang besar, serta tersedia "bahan bakar" berupa komposisi penduduk yang masuk kategori usia produktif.

Pada saat impian kita untuk menerbangkan sang super jumbo ke titik tertinggi sedang melambung, ternyata masih banyak bagian komponen pesawat yang konslet dan mendesak untuk segera diperbaiki. Komponen apa saja yang sedang konslet dalam pesawat super jumbo? Hal itu tidak lain adalah: latar pendidikan penduduk rata-rata rendah, kecakapan dan keahlian penduduk rata-rata rendah, kemampuan berwirausaha penduduk rendah, kualitas kesehatan penduduk rendah, kualitas infrastruktur rendah, kesiapan teknologi rendah, kualitas birokrasi pemerintahan rendah, dan efisiensi pasar tenaga kerja rendah pula. Berbagai komponen pesawat super jumbo yang berkualitas rendah ini selanjutnya merembet ke persoalan: penegakan hukum lemah, korupsi meningkat, kemiskinan tinggi, ekonomi biaya tinggi, kesenjangan sosial ekonomi meningkat, kriminalitas meningkat, koefisien indeks pembangunan manusia Indonesia rendah, daya saing rendah, iklim investasi rendah, tingkat produktifitas rendah, dan semuanya bermuara pada rendahnya kualitas pertumbuhan ekonomi. Kini sang pesawat super jumbo sedang terjebak dalam fenomena paradoks: Pada saat PDB dan rata-rata pendapatan per kapita kian membesar, kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi justru kian melebar.

Ketika pesawat super jumbo sedang menghadapi masalah selama penerbangan, Sang "kapten pilot" merupakan figur utama dan pertama yang harus turun tangan untuk menjadi komandan dalam kegiatan perbaikan. Ia harus turun tangan secara langsung, mengkoordinir para "teknisi" dan semua "awak kabin" dalam kegiatan perbaikan itu. Keputusan yang dibuat "kapten pilot" itulah yang disebut dengan produk hukum: peraturan perundangan dan kebijakan. Peraturan dan kebijakan yang dibuat "kapten pilot" tentu saja harus dirumuskan dengan sangat cermat, dan sekali diputuskan maka ia harus dilaksanakan dengan konsisten, dan berlaku bagi seluruh penumpang pesawat super jumbo tanpa pandang bulu. Bila tahapan ini mampu dilewati, maka tertib sosial didalam penerbangan akan dapat diciptakan; dan pesawat super jumbo pun akan tetap terus melaju terbang tanpa tergoncang. Selanjutnya semua "penumpang" tentu diharapkan memiliki kepedulian dengan situasi dan kondisi pesawat, dan segera melaporkan kepada para "awak kabin" apabila ada sesuatu yang diperkirakan dapat mengganggu penerbangan. Artinya, partisipasi publik sangat dibutuhkan untuk membawa pesawat super jumbo Indonesia untuk terus terbang tinggi. Partisipasi publik yang baik juga memungkinkan tata penyelenggaraan negara akan lebih terkontrol, sehingga penyalahgunaan wewenang oleh "kapten pilot" beserta segenap "awak kabin" akan dapat diminimalkan sedini mungkin.

Partisipasi publik akan semakin kuat apabila didukung oleh latar belakang pendidikan yang memadai. Oleh karena itu, layanan pendidikan, hingga sampai pada pendidikan tinggi; harus dapat diakses secara merata. Warga negara

(dianalogikan dengan "penumpang") yang terdidik dengan baik akan memungkinkan mereka untuk mengembangkan kemampuan wirausahanya. Artinya, di tangan warga yang terdidik berbagai sumber daya ekonomi yang ada akan dapat dioptimalkan pemanfaatannya. Dengan kata lain, peningkatan produktifitas nasional dapat dilakukan dengan membuka layanan pendidikan yang dapat diakses secara merata oleh seluruh warga.

Pemerintah yang stabil dan efektif ditandai dengan terciptanya tata penyelenggaraan negara yang efisien, yang memungkinkan semua kegiatan usaha di masyarakat dapat berjalan dengan transparan, mudah, murah, dan cepat. Tata penyelenggaraan negara yang efisien juga membutuhkan warga yang terdidik untuk memperkuat kontrol pemerintahan oleh publik. Transparansi, kemudahan, dan kecepatan layanan merupakan berbagai variabel yang akan mendukung kegiatan usaha di masyarakat akan tumbuh dan berkembang; sehingga produktifitas dapat meningkat. Produktifitas yang meningkat akan berdampak pada terciptanya lapangan kerja, sehingga pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan sosial dapat ditekan.

Pemerintah bersama-sama dengan masyarakat, terutama dengan kalangan pendidikan tinggi; harus mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan kegiatan kewirausahaan dapat berkembang dengan baik. Lingkungan sosial, termasuk lingkungan keluarga juga berperan penting untuk tumbuh suburnya perilaku kewirausahaan. Selama ini lingkungan sosial masyarakat kita sering "dituduh" kurang mendukung berkembangnya kegiatan kewirausahaan. Hingga saat ini ada anggapan bahwa kebanyakan warga

masyarakat lebih berorientasi menjadi pegawai, terutama pegawai negeri; daripada menjadi pewirausaha. Orientasi menjadi pegawai inilah yang konon masih banyak menjangkiti kaum terdidik, termasuk dari kalangan pendidikan tinggi. Melalui otoritasnya, pemerintah dapat menjadikan gerakan kewirausahaan sebagai sebuah gerakan nasional yang harus dilaksanakan secara intensif di semua sektor kehidupan. Peningkatan kualitas perekonomian nasional, pengurangan pengangguran, dan upaya menekan angka kemiskinan dapat dilakukan dengan menumbuhkan budaya wirausaha.

Tingginya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya PDB yang diikuti dengan semakin besarnya rata-rata pendapatan perkapita akan lebih bermakna apabila angka pengangguran dan kesenjangan sosial dapat dikurangi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi dan stabil, yang didukung dengan kegiatan ekonomi produktif akan membuat perekonomian Indonesia menjadi lebih berkualitas. Bila ini yang terjadi, impian kita untuk menerbangkan "sang super jumbo" Indonesia kedalam kancah perekonomian global akan lebih mungkin untuk segera diwujudkan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Angka Kemiskinan di Indonesia. Berita Resmi Statistik No. 06/01/Th.XVI, 2 Januari 2013

<http://bapenas.go.id/blog>. Mempercepat Bangunan Infrastruktur, diakses 10 Maret 2013

<http://bapenas.go.id/blog>. Penurunan Daya Saing Indonesia Tahun 2012, diakses 10 Maret 2013

<http://portalkbr.com>. Produktifitas Nasional Rendah, diakses 10 Maret 2013

<http://Pusdatinaker.balitfo.depnakertrans.go.id>. Pengangguran Terbuka Nasional Menurut Pendidikan dan Lokasi Tempat Tinggal, diakses 21 Maret 2012

<http://merdeka.com>. Permintaan Tenaga Kerja di Indonesia, diakses 5 Maret 2012

<http://analisdaily.com>. Kesenjangan Sosial Ekonomi Indonesia, diakses 7 Maret 2013

<http://www.ti.or.id/indes.php>. Indeks Persepsi Korupsi Tahun 2012, diakses 14 Maret 2013

<http://www.prosperity.com/rankings.aspx>. The 2011 Legatum Prosperity Index, diakses 10 Maret 2012

<http://m.okezone.com>. Investasi Asing Terus Tumbuh, diakses 6 Maret 2013

<http://worldbank.org>. GDP (current US\$) Data in 2010, diakses 15 Juli 2012

<http://imf.org>. GDP and IPC Data ini 2011, diakses 16 Juli 2012

<http://kompasiana.com/wirausaha>. Potensi Ekonomi Indonesia, diakses 6 Maret 2013

<http://infobanknews.com>. Perekonomian Indonesia, diakses 5 Maret 2013

Indeks Tendensi Bisnis. Berita Resmi Statistik No. 15/02/Th.XVI, 5 Februari 2013

Prianto, Agus. 2012. Identifikasi Berbagai Faktor Pemicu Orientasi Kewirausahaan (Studi pada Para Pengusaha di Empat Kota di Jawa Timur. *Jurnal Manajemen Usahawan Indonesia*. Vol.41 No.3 Hal.243-270

UNCTAD. 2006. *World Investment Report 2006*. New York and Geneva: United Nations Conference on Trade and Investment

WEF. 2006. *The Global Competitiveness Report 2006-2007*. Geneva: World Economic Forum

WEF. 2007. *The Global Competitiveness Report 2007-2008*. Geneva: World Economic Forum

WEF. 2010. *The Global Competitiveness Report 2010-2011*. Geneva: World Economic Forum

WEF. 2011. *The Global Competitiveness Report 2011-2012*. Geneva: World Economic Forum

WEF. 2012. *The Global Competitiveness Report 2012-2013*. Geneva: World Economic Forum